



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 14 / TAHUN 2019

TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAYAH SWASTA (MIS)
BABUSSALAM MALBUFA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Operasional Madrasah Ibtidayah Swasta (MIS) Babussalam Malbufo.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah;
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;

14. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Penegerian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

Memperhatikan : 1. Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan Islam Nomor: B-232/Kw.27.2/1/PP.00/07/2019, Tanggal 04 Juli 2019;
2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: B-959/Kk.27.5.2/PP.00/09/2018, tanggal 25 September 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAYAH SWASTA (MIS) BABUSSALAM MALBUFA.**

KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

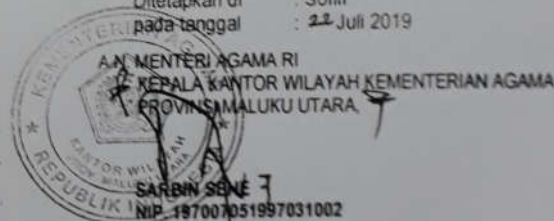
KEDUA : Madrasah Ibtidayah Swasta (MIS) Babussalam Malbufo setelah jangka waktu 4 (empat) tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:
a. menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan atau
b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud diktum kedua huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu tetap berlaku.

KEEMPAT : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud diktum kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dicabut.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sofifi
pada tanggal : 22 Juli 2019



Tembusan:

1. Yth, Sekjen Kementerian Agama RI, Jakarta;
2. Yth, Inspektur Jendral Kementerian Agama RI, Jakarta;
3. Yth, Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
4. Yth, KPPN Ternate, Ternate;
5. Yth, Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Kepulauan Sula, Sanana;
6. Yth, Masing-masing pihak yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran:
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 141 TAHUN 2019
TENTANG : PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAYAH SWASTA (MIS)
BABUSSALAM MALBUFA

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidayah Swasta (MIS) Babussalam Malbufa
2	Nomor Statistik Madrasah	111282050018
3	Alamat Madrasah	Jl. Kenangan Rt/Rw.003/002, Desa/Kel. Malbufo Kec. Sanana Utara
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Babussalam Sanana
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 39 Helmy, SH
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-111.AH.01.02, Tahun 2008, Tanggal 17 Januari 2008

Ditetapkan di : Sofifi
pada tanggal : 22 Juli 2019

KEMENTERIAN AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI MALUKU UTARA,
SABIN SENE
NIP. 197007051997031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor : B-234/Kw. 27.2/1/PP.00/07/2019

Diberikan Kepada:

Nama Madrasah : Madrasah Ibtidayah Swasta (MIS) Babussalam Malbufa
Alamat Madrasah : Jl. Kenangan Rt/Rw. 003/002
Desa/Kelurahan : Malbufa
Kecamatan : Sanana Utara
Kabupaten/Kota : Kepulauan Sula
Provinsi : Maluku Utara
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Babussalam Sanana
Akte Notaris Penyelenggara : No. 39, Helmy SH
Pengesahan Akte Notaris : AHU-111.AH.01.02, Tahun 2008, Tanggal 17 Januari 2008

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	8	2	0	5	0	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Juli 2019

